



HUBUNGAN MANAJEMEN KOLABORATIF DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM PENURUNAN STUNTING DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TANAH TUMBUH

Dewi Ratnadi*, Sri Fawziyah, Rida Suriani

Program Studi Sarjana Keperawatan, Universitas Dharma Indonesia, Dharmasraya, Sumatra Barat, Indonesia

*Email: dewiratnadi81@gmail.com

Abstract

Background: Stunting is a health problem that requires the involvement of various stakeholders in the implementation of stunting reduction programs. Collaborative management is needed to support coordination and cross-sector involvement in program implementation. **Objective:** This study aimed to determine the relationship between collaborative management and the implementation of the stunting reduction program in the working area of Tanah Tumbuh Public Health Center in 2026. **Methods:** This study used a descriptive-analytical method with a cross-sectional design. The sample consisted of 66 respondents selected using purposive sampling. Data were collected using a 23-item collaborative management questionnaire and an observation checklist consisting of 23 indicators for the implementation of the stunting reduction program. **Results:** Collaborative management was mostly categorized as poor, with 35 respondents (53%), while the implementation of the stunting reduction program was mostly categorized as poor, with 42 respondents (63.6%). The Pearson chi-square test showed a p-value of 0.001, indicating a significant relationship between collaborative management and the implementation of the stunting reduction program in the working area of Tanah Tumbuh Public Health Center in 2026. **Conclusion:** There was a significant relationship between collaborative management and the implementation of the stunting reduction program. Improvement in cross-sector coordination, communication, role distribution, monitoring and evaluation, and stakeholder involvement is recommended to strengthen program implementation.

Keywords: Collaborative management, stunting reduction program implementation, collaborative governance

Abstrak

Latar Belakang: Stunting merupakan permasalahan kesehatan yang memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program penurunan stunting. Manajemen kolaboratif diperlukan untuk mendukung koordinasi dan keterlibatan lintas sektor dalam pelaksanaan program. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara manajemen kolaboratif dengan pelaksanaan program penurunan stunting di wilayah kerja UPT Puskesmas Tanah Tumbuh tahun 2026. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan desain *cross-sectional*. Sampel penelitian berjumlah 66 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner manajemen kolaboratif yang terdiri dari 23 pernyataan dan lembar observasi pelaksanaan program penurunan stunting yang terdiri dari 23 indikator. **Hasil:** Manajemen kolaboratif sebagian besar berada dalam kategori kurang baik, yaitu sebanyak 35 responden (53%), sedangkan pelaksanaan program penurunan stunting sebagian besar berada dalam kategori kurang baik, yaitu sebanyak 42 responden (63,6%). Hasil uji *Pearson chi-square* menunjukkan *p*-value sebesar 0,001, yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara manajemen kolaboratif dengan pelaksanaan program penurunan stunting di wilayah kerja UPT Puskesmas Tanah Tumbuh tahun 2026. **Kesimpulan:** Terdapat hubungan yang signifikan antara manajemen kolaboratif dengan pelaksanaan program penurunan stunting. Peningkatan koordinasi lintas sektor, komunikasi, pembagian peran, monitoring dan evaluasi, serta keterlibatan pemangku kepentingan diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan program.

Kata Kunci: Manajemen kolaboratif, pelaksanaan program penurunan stunting, *collaborative governance*

PENDAHULUAN

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam periode panjang sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun. Masalah kesehatan global yang serius ini ditandai dengan rendahnya indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) di bawah standar pertumbuhan *World Health Organization* (WHO) (WHO, 2023). Dampak stunting bersifat multidimensional dan berjangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, yang meliputi keterlambatan perkembangan kognitif, rendahnya prestasi belajar, penurunan produktivitas ekonomi di usia dewasa, serta peningkatan risiko penyakit tidak menular. Secara global, WHO melaporkan bahwa terdapat sekitar 127 juta balita di dunia mengalami stunting (WHO Indonesia, 2024). Di Indonesia, persoalan ini masih menjadi fokus utama kebijakan nasional. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan angka stunting nasional berada di kisaran 18,5% hingga 19%, namun laporan evaluasi terkini menunjukkan adanya "stagnasi semu" di level 17,8%. Realitas empiris ini menuntut evaluasi total terhadap efektivitas manajemen intervensi di lapangan, pelayanan kesehatan primer seperti Puskesmas, hingga tata kelola di tingkat pemerintahan desa.

Urgensi penanganan stunting di pelataran daerah tercermin nyata di Provinsi Jambi yang mencatat prevalensi stunting sebesar 17,1%. Meskipun capaian ini berada di bawah rata-rata nasional, angka tersebut masih terpaut dari target nasional yang ditetapkan sebesar 14% (Kemenkes RI, 2018). Secara lokal, Kabupaten Bungo mencatat dinamika kasus stunting yang fluktuatif namun persisten, di mana pada wilayah kerja UPT Puskesmas Tanah Tumbuh ditemukan kantong-kantong desa yang angka stuntingnya cenderung menetap atau memunculkan kasus baru. Berdasarkan laporan tahunan program gizi di Puskesmas Tanah Tumbuh per Mei 2026, fenomena stunting menetap ini terjadi secara nyata di Desa Koto Jayo, Desa Lubuk Niur, dan Desa Bukit Kemang. Berbagai program intervensi

spesifik berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pemantauan pertumbuhan balita melalui Posyandu, serta suplementasi zat gizi telah digulirkan secara optimal. Namun, terdapat kendala manajerial yang bersifat sistemik dan teknis di akar rumput, di mana intervensi medis seringkali berjalan parsial akibat lemahnya pengawasan, mobilisasi massa yang minim, serta belum padunya gerak konvergensi lintas sektor. Hal ini mempertegas rasionalisasi bahwa penanggulangan stunting tidak lagi sekadar urusan medis-klinis, melainkan perihal efektivitas tata kelola kolaboratif lintas instansi.

Secara teoritis, permasalahan kompleks yang melibatkan multisektor dan tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi secara mandiri memerlukan pendekatan manajemen kolaboratif. Kajian literatur menunjukkan bahwa konsep kolaborasi diartikan sebagai bentuk aktivitas bersama oleh dua institusi atau lebih yang ditujukan untuk meningkatkan nilai publik (*public value*) ketimbang bekerja sendiri-sendiri. Menurut teori *Collaborative Governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash, keberhasilan sebuah tata kelola kolaboratif bersandar pada proses interaksi yang berkesinambungan melalui elemen komunikasi lintas sektor, koordinasi program, ketergantungan sumber daya (*resource dependence*), pembagian peran yang jelas (*clear roles*), serta evaluasi dan pembelajaran bersama. Model kolaboratif yang penuh (*Collaborative Model*) menekankan pembentukan kemitraan yang kuat dan pembagian tanggung jawab yang eksplisit antara sektor kesehatan, birokrasi pemerintahan desa, dan kader pelaksana lapangan (seperti Tim Pendamping Keluarga dan Kader Pembangunan Manusia). Penyelarasan sumber daya ini menjadi vital agar intervensi spesifik (sektoral medis) dan intervensi sensitif (seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan bansos) dapat menyasar kelompok prioritas secara terintegrasi dan tepat sasaran.

Berbagai penulisan terdahulu memperkuat urgensi hubungan kausalitas

antara manajemen organisasi dengan capaian program gizi stunting. Studi kuantitatif analitik oleh Rambey menyimpulkan bahwa dukungan lintas program dan lintas sektor berhubungan signifikan dengan capaian penanggulangan stunting, di mana koordinasi yang lemah dan minimnya pemantauan menjadi hambatan utama intervensi. Selanjutnya, penelitian deskriptif oleh Rambey (2025) dan Rohmatulloh et al.,(2025), mengonfirmasi bahwa kolaborasi antarsektoral di tingkat desa memberikan dampak positif nyata untuk mengentaskan stunting, meskipun aspek komunikasi efektif dan pengelolaan ketergantungan sumber daya seringkali menjadi celah yang perlu ditingkatkan. Di ranah pelayanan primer, penelitian Musdalifah mengenai *Interprofessional Collaboration* (IPC) menyarankan optimalisasi fungsi koordinasi dan kemitraan tenaga kesehatan untuk mendongkrak keberhasilan program pengendalian stunting (Musdalifah et al., 2023). Namun, terdapat celah (*gap*) dalam literatur di mana sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek kebijakan publik makro atau kolaborasi klinis internal, dan masih terbatas yang menganalisis kaitan langsung antara performa manajemen kolaboratif tingkat dusun/desa dengan kualitas keterlaksanaan konvergensi program penurunan stunting di lapangan secara simultan.

Berdasarkan latar belakang, rasionalisasi, dan telaah literatur tersebut, studi ini diarahkan untuk mengisi celah riset dengan menganalisis secara mendalam kondisi riil di tingkat pelayanan kesehatan primer Jambi. Permasalahan mendasar yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya indikasi pelemahan koordinasi, *ego sektoral*, tumpang tindih peran (*role ambiguity*), serta belum satu frekuensinya sinkronisasi data klinis Puskesmas dengan forum evaluasi di tingkat desa. Tujuan penulisan artikel hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui secara analitik hubungan antara manajemen kolaboratif dengan pelaksanaan program penurunan stunting di wilayah kerja UPT Puskesmas Tanah Tumbuh. Secara spesifik,

rencana pemecahan masalah difokuskan pada pengujian hipotesis penelitian yang diajukan, yaitu hipotesis alternatif (H_a) yang menyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara manajemen kolaboratif dengan pelaksanaan program penurunan stunting di wilayah kerja UPT Puskesmas Tanah Tumbuh. Melalui pengujian ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi ilmiah berupa rekomendasi berbasis data empiris bagi penguatan tata kelola kebijakan penurunan stunting yang integratif di tingkat komunitas.

METODE

Penelitian deskriptif analitik ini menggunakan pendekatan *cross-sectional* untuk menganalisis hubungan manajemen kolaboratif lintas sektor (variabel bebas) dengan pelaksanaan program penurunan stunting (variabel terikat). Penelitian dilaksanakan di Desa Koto Jayo, Desa Lubuk Niur, dan Desa Bukit Kemang wilayah kerja UPT Puskesmas Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, Jambi pada bulan Juni hingga Juli tahun 2026. Populasi penelitian adalah seluruh unsur lintas sektor struktural dan teknis lapangan program percepatan penurunan stunting yang berjumlah 79 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* berdasarkan kriteria inklusi masa kerja minimal 6 bulan, dengan ukuran sampel minimum dihitung menggunakan rumus Slovin sejumlah 66 responden yang didistribusikan secara proporsional.

Bahan dan alat utama dalam penelitian ini adalah kuesioner terstruktur dan lembar observasi yang diadopsi serta dimodifikasi dari instrumen terstandarisasi. Variabel manajemen kolaboratif diukur melalui 23 pernyataan skala Likert lima pilihan jawaban untuk menilai kapasitas koordinasi, komunikasi, dan pembagian peran lintas sektor. Skor total dikategorikan menjadi baik jika nilai responden lebih besar atau sama dengan nilai rata-rata (*mean*) dan kurang baik jika kurang dari nilai rata-rata. Variabel pelaksanaan program penurunan stunting diukur dengan lembar observasi biner

berbentuk daftar tilik 23 indikator kegiatan nyata di lapangan. Penilaian diberikan skor 1 untuk ada/terlaksana dan skor 0 untuk tidak ada, yang kemudian dikelompokkan menjadi kategori baik (skor lebih besar atau sama dengan nilai rata-rata) dan kurang baik (skor kurang dari nilai rata-rata).

Teknik pengumpulan data primer dilakukan secara langsung oleh peneliti melalui pengisian lembar persetujuan (*informed consent*), kuesioner, dan lembar observasi saat kunjungan lapangan maupun forum koordinasi bulanan. Data sekunder berupa profil puskesmas dan data prevalensi stunting diperoleh melalui telaah dokumen administratif. Seluruh data mentah melalui tahapan penyuntingan (*editing*), pengkodean (*coding*), penilaian (*scoring*), dan pembersihan data (*cleaning*) sebelum dimasukkan ke dalam perangkat pengolah statistik. Teknik analisis data menggunakan analisis univariat untuk mendeskripsikan distribusi frekuensi persentase, serta analisis bivariat menggunakan uji statistik Chi-Square (χ^2) pada tingkat kepercayaan 95% dengan signifikansi $\alpha = 0,05$. Keputusan statistik diambil berdasarkan nilai *p-value* kurang dari atau sama dengan 0,05 untuk menyatakan adanya hubungan yang signifikan. Penelitian ini telah memenuhi kelayakan etik melalui jaminan kerahasiaan (*confidentiality*) dan tanpa nama (*anonymity*).

HASIL

Hasil penelitian disajikan secara sistematis berdasarkan ruang lingkup penelitian untuk mengetahui distribusi frekuensi manajemen kolaboratif, pelaksanaan program penurunan stunting, serta hubungan di antara kedua variabel tersebut di wilayah kerja UPT Puskesmas Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. Data dikumpulkan dari enam puluh enam responden lintas sektor yang memenuhi kriteria sampel. Hasil analisis univariat untuk variabel independen dan dependen dijabarkan secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Manajemen Kolaboratif

Kategori	f	%
Baik	31	47
Kurang Baik	35	53
Total	66	100

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa dari 66 responden, sebagian besar responden, yaitu sebanyak 35 responden (53%), menyatakan Manajemen Kolaboratif dalam kategori kurang baik, sedangkan hampir setengahnya, yaitu sebanyak 31 responden (47%), menyatakan Manajemen Kolaboratif dalam kategori baik.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Program Penurunan Stunting

Kategori	f	%
Baik	24	36,4
Kurang Baik	42	63,6
Total	66	100

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa dari 66 responden, sebagian besar responden, yaitu sebanyak 42 responden (63,6%), menyatakan Pelaksanaan Program Penurunan Stunting dalam kategori kurang baik, sedangkan hampir setengahnya, yaitu sebanyak 24 responden (36,4%), berada pada kategori baik.

Tabel 3 Hubungan Manajemen Kolaboratif dengan Pelaksanaan Program Penurunan Stunting

Peran Manajemen Kolaboratif	Pelaksanaan Program Penurunan Stunting				Jumlah		P- Value
	Baik		Kurang Baik		f	%	
	f	%	f	%			
Baik	18	58,1	13	41,9	31	100	0,001
Kurang Baik	6	17,1	29	82,9	35	100	
Total	24	36,4	42	63,6	66	100	

$$\chi^2 \text{ hitung} = 11,897$$

$$\chi^2 \text{ tabel} = 3,841$$

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa dari 35 responden yang menyatakan Manajemen Kolaboratif kategori kurang baik, hampir seluruhnya yaitu sebanyak 29 responden (82,9%) menyatakan Pelaksanaan Program Penurunan Stunting dalam kategori kurang baik, sedangkan sebagian kecil yaitu sebanyak 6 responden (17,1%) menyatakan Pelaksanaan Program Penurunan Stunting dalam kategori baik.

PEMBAHASAN

Performa Manajemen Kolaboratif

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan Manajemen Kolaboratif di wilayah kerja UPT Puskesmas Tanah Tumbuh dalam kategori kurang baik, yaitu sebanyak 35 responden (53,00%), sedangkan 31 responden (47,00%) berada pada kategori baik. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Rahmat et al. (2025) di Desa Marinding, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, yang menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* berada pada kategori baik dengan nilai persentase sebesar 73,14%. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa kondisi manajemen kolaboratif dapat berbeda sesuai dengan karakteristik wilayah, jenis program, serta tingkat keterlibatan dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Manajemen kolaboratif merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya kerja sama berbagai aktor dalam menyelesaikan permasalahan publik yang kompleks. Permasalahan stunting tidak dapat ditangani hanya oleh sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah desa, puskesmas, kader kesehatan, Tim Pendamping Keluarga, PKK, sektor pendidikan, sektor sosial, sektor swasta, dan masyarakat (Sumanti, 2024). Semakin baik koordinasi dan kolaborasi antar aktor, maka semakin besar peluang keberhasilan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner pada masing-masing indikator, terdapat beberapa aspek Manajemen Kolaboratif yang memperoleh skor relatif rendah, terutama pada koordinasi lintas sektor yang dilakukan secara rutin, komunikasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program, serta pelaksanaan evaluasi bersama setelah kegiatan berlangsung. Sebaliknya, indikator pembagian tugas sesuai fungsi masing-masing memperoleh skor yang relatif lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap instansi telah menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing, namun koordinasi,

komunikasi, dan evaluasi bersama antar sektor masih belum berjalan secara optimal sehingga berkontribusi terhadap rendahnya Manajemen Kolaboratif. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh belum optimalnya komunikasi lintas sektor, koordinasi yang belum dilakukan secara rutin, pembagian tugas yang belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh pelaksana, serta masih adanya kecenderungan setiap sektor bekerja sesuai tugas masing-masing tanpa integrasi yang kuat (Afandi et al., 2023). Situasi seperti ini dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan program karena proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah belum dilakukan secara kolaboratif. Menurut teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007), keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh empat komponen utama, yaitu *starting conditions*, *institutional design*, *facilitative leadership*, dan *collaborative process*. Apabila salah satu komponen belum berjalan secara optimal, maka kualitas kolaborasi juga akan menurun sehingga berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan program.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayasa, Kurnianingsih, dan Hendrayady (2023) yang menyatakan bahwa pelaksanaan *collaborative governance* dalam percepatan penurunan stunting masih menghadapi berbagai hambatan, seperti koordinasi lintas sektor yang belum optimal, partisipasi aktor nonpemerintah yang masih terbatas, serta perlunya peningkatan komitmen bersama antar pelaksana program. Temuan penelitian ini juga didukung oleh penelitian Afrida, Mustofa, dan Susilo (2024) yang menjelaskan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam pencegahan stunting memerlukan kepemimpinan fasilitatif, komunikasi yang terbuka, serta koordinasi yang berkesinambungan antar organisasi agar tujuan percepatan penurunan stunting dapat tercapai secara efektif. Menurut peneliti, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen Kolaboratif di wilayah kerja UPT Puskesmas Tanah Tumbuh masih memerlukan penguatan pada berbagai aspek. Asumsi peneliti, kondisi tersebut terjadi karena setiap sektor dan

pelaksana program telah melaksanakan tugas sesuai fungsi masing-masing, namun koordinasi, komunikasi, dan integrasi antar instansi belum dilakukan secara optimal dan berkesinambungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, komunikasi yang lebih intensif, monitoring dan evaluasi secara berkala, serta peningkatan komitmen seluruh pemangku kepentingan agar kualitas Manajemen Kolaboratif semakin baik (Afandi et al., 2023; Sumanti, 2024).

Pelaksanaan Program Penurunan Stunting

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Program Penurunan Stunting di wilayah kerja UPT Puskesmas Tanah Tumbuh sebagian besar berada pada kategori kurang baik, yaitu sebanyak 42 responden (63,60%), sedangkan 24 responden (36,40%) berada pada kategori baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Penurunan Stunting belum sepenuhnya terlaksana secara optimal sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam penelitian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat beberapa aspek pelaksanaan program yang memerlukan perbaikan agar tujuan percepatan penurunan stunting dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hastika et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di tingkat puskesmas masih menghadapi berbagai kendala sehingga implementasi program belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan Program Penurunan Stunting merupakan bagian dari upaya Nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pencegahan stunting sejak masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, masih terdapat indikator pelaksanaan Program Penurunan Stunting yang memperoleh penilaian kurang baik dari responden. Indikator yang paling banyak dinilai belum optimal meliputi pelaksanaan monitoring dan evaluasi program secara berkala, koordinasi lintas sektor yang belum dilakukan secara rutin, tindak lanjut hasil

evaluasi yang belum konsisten, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Sebaliknya, indikator yang memperoleh penilaian baik adalah pelaksanaan kegiatan pelayanan dasar seperti Posyandu, pemantauan pertumbuhan balita, dan pemberian edukasi kepada sasaran. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan teknis telah berjalan, namun aspek koordinasi, evaluasi, dan integrasi antarinstansi masih memerlukan penguatan agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh belum optimalnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang belum maksimal, serta masih adanya perbedaan kapasitas pelaksana program dalam mengimplementasikan setiap kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Salsabila & Santoso, 2023).

Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebanyak 24 responden (36,40%) menyatakan Pelaksanaan Program Penurunan Stunting dalam kategori baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian pelaksana program telah mampu melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, seperti pelaksanaan kegiatan Posyandu, pemantauan pertumbuhan balita, pemberian edukasi gizi, pendampingan keluarga berisiko stunting, serta koordinasi lintas program maupun lintas sektor (Pramudiani et al., n.d.). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Salsabila dan Santoso (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan program penanganan stunting sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektor, komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang mampu memfasilitasi kolaborasi, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan (Salsabila & Santoso, 2023). Penelitian Afandi et al. (2023) juga menjelaskan bahwa pelaksanaan program percepatan penurunan stunting memerlukan koordinasi yang terstruktur, mekanisme komunikasi yang jelas, serta komitmen seluruh organisasi yang terlibat. Menurut

peneliti, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas pelaksana program melalui pembinaan dan pelatihan, monitoring serta evaluasi secara berkala, dan peningkatan keterlibatan masyarakat agar Pelaksanaan Program Penurunan Stunting dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan (Hastika et al., 2024; Sumanti, 2024).

Hubungan Manajemen Kolaboratif dengan Pelaksanaan Program

Berdasarkan hasil analisis bivariat menggunakan uji Chi-Square diperoleh bahwa dari 31 responden yang menyatakan Manajemen Kolaboratif kategori baik, sebanyak 18 responden (58,10%) menyatakan Pelaksanaan Program Penurunan Stunting kategori baik dan 13 responden (41,90%) berada pada kategori kurang baik. Sementara itu, dari 35 responden yang menyatakan Manajemen Kolaboratif kategori kurang baik, sebanyak 6 responden (17,10%) menyatakan Pelaksanaan Program Penurunan Stunting kategori baik dan 29 responden (82,90%) berada pada kategori kurang baik. Hasil uji Chi-Square menunjukkan nilai $p\text{-value} = 0,001$ yang lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$, sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Manajemen Kolaboratif dengan Pelaksanaan Program Penurunan Stunting di wilayah kerja UPT Puskesmas Tanah Tumbuh Tahun 2026. Perbedaan proporsi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan bahwa semakin baik Manajemen Kolaboratif yang diterapkan, maka semakin baik pula Pelaksanaan Program Penurunan Stunting (Afandi et al., 2023).

Menurut teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008), keberhasilan suatu kolaborasi dipengaruhi oleh empat komponen utama, yaitu *starting conditions*, *institutional design*, *facilitative leadership*, dan *collaborative process*. Dalam konteks penelitian ini, komponen *collaborative process* menjadi salah satu aspek yang

sangat penting dalam mendukung keberhasilan Program Penurunan Stunting. Proses kolaboratif tidak hanya diwujudkan melalui pertemuan koordinasi, tetapi juga melalui komunikasi yang berkesinambungan, keterbukaan informasi, penyelesaian masalah secara bersama, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta adanya komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan yang sama (Ansell & Gash, 2008). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayasa, Kurnianingsih, dan Hendrayady (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi *collaborative governance* dalam percepatan penurunan stunting dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektor, komunikasi yang efektif, komitmen bersama, serta kepemimpinan yang mampu memfasilitasi seluruh organisasi yang terlibat (Kurniawati et al., 2025).

Temuan penelitian ini juga didukung oleh penelitian Afrida, Mustofa, dan Susilo (2024) yang menjelaskan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam pencegahan stunting memerlukan komunikasi yang terbuka, kepemimpinan fasilitatif, koordinasi lintas sektor yang berkesinambungan, serta komitmen bersama dalam melaksanakan setiap kegiatan. Penelitian Afandi et al. (2023) juga menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Program Penurunan Stunting memerlukan koordinasi yang terstruktur, komunikasi yang jelas, pembagian peran yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta komitmen seluruh organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program. Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas Manajemen Kolaboratif perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan dalam Program Penurunan Stunting. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi lintas sektor melalui peningkatan koordinasi, komunikasi, komitmen bersama, monitoring dan evaluasi, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan perlu terus dilakukan agar pelaksanaan Program Penurunan Stunting dapat berlangsung secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan sehingga tujuan percepatan penurunan stunting dapat

tercapai secara optimal (Afandi et al., 2023; Hidayasa et al., 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai intervensi stunting di wilayah kerja UPT Puskesmas Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, dapat disimpulkan bahwa manajemen kolaboratif lintas sektor secara signifikan berhubungan langsung dengan tingkat keterlaksanaan program penurunan stunting di lapangan ($p\text{-value} = 0,001 < 0,05$). Realitas empiris menunjukkan mayoritas responden menilai manajemen kolaboratif masih berada dalam kategori kurang baik (53,00%) dan berimplikasi linear terhadap tingginya persentase capaian pelaksanaan program konvergensi stunting yang juga dikategorikan kurang baik (63,60%). Kelemahan manajerial yang bersumber dari rendahnya frekuensi pertemuan rutin, lemahnya monitoring terpadu, serta munculnya ego sektoral lintas instansi terbukti menjadi faktor utama yang menghambat keterpaduan intervensi spesifik klinis dengan intervensi sensitif pada tingkat pedesaan.

Saran strategis yang direkomendasikan bagi keberlanjutan program adalah mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dan UPT Puskesmas Tanah Tumbuh untuk mereformasi tata kelola melalui penguatan forum koordinasi triwulanan yang terstruktur bersama perangkat desa. Diperlukan penegasan kejelasan pembagian peran tertulis guna mengeliminasi tumpang tindih tanggung jawab di lapangan antara Bidan Desa, Kader Pembangunan Manusia, dan Tim Pendamping Keluarga. Selain itu, optimalisasi alokasi penganggaran Dana Desa wajib diintegrasikan langsung secara berkesinambungan dengan sistem pemantauan umpan balik data klinis puskesmas, sehingga mobilisasi dan pemenuhan layanan dasar bagi empat kelompok sasaran prioritas dapat berjalan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan komprehensif.

SARAN

Saran strategis yang direkomendasikan berdasarkan temuan di lapangan ditujukan kepada beberapa pihak terkait guna meningkatkan efektivitas program di masa mendatang. Bagi institusi Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dan UPT Puskesmas Tanah Tumbuh, disarankan untuk mereformasi tata kelola melalui penguatan forum koordinasi triwulanan lintas sektor yang rutin dan terstruktur, serta mempertegas kejelasan pembagian peran tertulis guna mengeliminasi tumpang tindih tanggung jawab antara Bidan Desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM), dan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Bagi pemerintah desa di wilayah lokus, alokasi anggaran Dana Desa untuk intervensi sensitif wajib disinkronisasikan secara berkala dengan umpan balik data klinis e-PPGBM milik Puskesmas agar mobilisasi empat kelompok sasaran prioritas dapat berjalan optimal. Bagi institusi Universitas Dharmas Indonesia, hasil studi ini dapat dijadikan referensi akademik terapan dalam pengembangan ilmu keperawatan komunitas dan kesehatan masyarakat. Sementara bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, memperbesar ukuran sampel, serta menambahkan variabel bebas potensial lainnya seperti faktor kepemimpinan fasilitatif dan komitmen organisasi menggunakan desain penelitian longitudinal agar dapat mengukur kekuatan pengaruh antarvariabel secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. N., Anomsari, E. T., Novira, A., & Sudartini, S. (2023). Collaborative Governance in a Mandated Setting: Shifting Collaboration in Stunting Interventions at Local Level. *Development Studies Research*, 10(1), 1–12.
<https://doi.org/10.1080/21665095.2023.2212868>
- Afrida, N., Mustofa, A., & Susilo, A. (2024). Penerapan Collaborative Governance dalam Pencegahan dan Penurunan

- Stunting di Tingkat Lokal. *Jurnal Tata Kelola Publik*, 9(1), 45–58.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bardach, E. (1998). *Getting Agencies Together: A Practical Guide for the Management of Interagency Collaboration*. Brookings Institution Press.
- Hastika, N., Devianty, T., Mutolib, A., & Sarihati, T. (2024). Collaborative Governance Reducing Stunting in Bandung City. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 13(1), 89–102.
- Hidayasa, Q., Kurnianingsih, F., & Hendrayady, A. (2023). Collaborative Governance dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bintan. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 4(2), 83–90.
- Kemendes RI. (2018). *Laporan provinsi Jambi: Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*.
- Musdalifah, U., Arifah, I., & Risnah. (2023). Penilaian Interprofessional Collaboration pada Puskesmas dalam Upaya Penanganan Stunting di Sulawesi Barat. *Journal of Health, Education and Literacy (J-Healt)*, 6(1), 1–7.
- Organization, W. H. (2023). Global Nutritional Status and Stunting Growth Progress Report: Multi-sectoral Interventions Framework. *World Health Organization Report*.
- Rambey, H. (2025). Hubungan Dukungan Lintas Program dan Lintas Sektor dengan Capaian Program Gizi dalam Penanggulangan Stunting. *Jurnal Kebidanan Kestra (JKK)*, 7(2), 234–242.
- Rohmatulloh, I., Widhiarto, I., Siahaan, S. C., Samudra, A. A., & Sahrul, M. (2025). Pengentasan Stunting Melalui Tata Kelola Kolaborasi antar Sektoral: Studi Kasus di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(5), 3690–3700.
- Salsabila, N., & Santoso, P. (2023). Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Demak. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 210–225.
- WHO Indonesia. (2024, November 1). *Laporan Komprehensif WHO tentang Kemajuan dan Kesenjangan Global*. WHO Indonesia.